

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN ASET
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang)**



Oleh:

**Michel Rendika
02129/2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DAN PELAKSANAAN PERAN INSPEKTORAT TERHADAP
PENYALAHGUNAAN ASET

Oleh:

MICHEL RENDIKA

02129/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

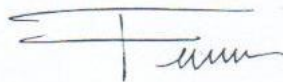
Padang,.....Agustus 2013

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, AK
NIP. 19730213 199903 1 003

PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN ASET

Michel Rendika

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089
(michel_dcopper@yahoo.com)

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the extent of (1) Effect of the implementation of the internal control system of the misuse of assets, and (2) Effect of the role of the inspectorate of the misuse of assets. This study considered the causative research. The population in this study is a Work Unit (SKPD) Padang. Data were collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. Processing the data using SPSS version 17.0 for windows. This study used a technique that is as much as 45 Total Sampling Unit (SKPD). The method of analysis used is multiple regression analysis with the misuse of assets as the dependent variable and the role of the inspectorate and the implementation of internal control systems as independent variables. The results of this study indicate (1) the existence of a significant and negative effect of the implementation of the internal control system of municipal against unauthorized asset $t_{count} < t_{table}$ is $-2.206 < -1.666$ (sig.0, 031 < 0.05) means that H1 is accepted (2) the existence of a significant and negative role of the inspectorate of the misuse of assets with $t_{count} < t_{table}$ is $-2,307 < -1.666$ (sig.0, 024 < 0.05) means that H2 is accepted.. In this study suggested inspectorate and apparatus for SPI to further improve the quality and independence in performing tasks in order to promote the establishment of a clean SKPD performance of these practices, especially acts of abuse diversion of assets. So the realization of a clean financial management, effective and efficient. For further research, if researchers are also using the same questionnaire should increase the number of samples and adding other variables that affect the misuse of assets.

Keywords: the implementation of internal control systems of municipal, role of the inspectorate, misuse of assets

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana (1) Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset (2) Pengaruh peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset . Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 for windows. Penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling yaitu sebanyak 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan penyalahgunaan aset sebagai variabel terikat dan pelaksanaan sistem pengendalian intern serta peran inspektorat sebagai variabel bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) adanya pengaruh yang signifikan dan negatif pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,206 < 1,666$ (sig.0,031 $< 0,05$) berarti H_1 diterima. (2) adanya pengaruh yang signifikan dan negatif peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,307 < 1,666$ (sig.0,024 $< 0,05$) berarti H_2 diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi aparat inspektorat untuk terus lebih ditingkatkan kualitas dan independensinya didalam menjalankan tugas agar dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset, sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuesioner yang sama hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyalahgunaan aset.

Kata kunci: pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, peran inspektorat, penyalahgunaan aset

1. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah, yaitu inspektorat. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktek-praktek kecurangan terutama penyalahgunaan aset dapat berkurang.

Dengan adanya koordinasi terhadap aset maka *track record* aset yang digunakan selama pelaksanaan program dapat tercatat dan dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan. Dengan adanya kontrol intern yang kuat di dalam instansi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, maka dapat mengurangi segala bentuk penyimpangan terutama penyalahgunaan aset, sehingga aset menjadi aman, pengamanan aset merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset

Keberadaan pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam suatu organisasi. Pengawasan dalam pemerintahan dibentuk dalam satu susunan

tersendiri dengan nama Inspektorat yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan prima kepada para pegawai yang dianggap bermasalah, mengawasi seluruh apa yang ada di daerahnya baik dari Aset daerah sampai pada pengalokasian anggaran, serta disiplin pegawai yang selanjutnya mengadakan kroscek terhadap kebenaran adanya penyalahgunaan aset, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada siapa saja yang menerima aset tersebut.

2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Arens (2008), tujuan dari dilaksanakannya sistem pengendalian intern adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji, untuk patuh terhadap perundang-undangan dan untuk menjaga aset organisasi. Dengan adanya koordinasi terhadap aset maka *track record* aset yang digunakan selama pelaksanaan program dapat tercatat dan dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan. Sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut (Mulyadi,1993:135). Dengan adanya kontrol intern yang kuat di dalam instansi pemerintahan, khususnya

pemerintahan daerah, maka dapat mengurangi segala bentuk penyimpangan terutama penyalahgunaan aset, sehingga aset menjadi aman, Pengamanan aset merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

Peran Inspektorat

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi a) administrasi umum pemerintahan, dan b) urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap, a) kebijakan daerah, b) kelembagaan, c) pegawai daerah, d) keuangan daerah, serta e) barang dan aset daerah. Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga dapat mempertahankan independensi dalam pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna

untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salah-satu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sehingga *track record* aset selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan.

Penyalahgunaan Aset

Menurut Tuanakotta (2007), Penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut. Hal tersebut terjadi karena ketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan sampai pelaporan, sehingga *track record* aset tersebut tidak dapat diketahui. Menurut Molida (2005), *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset) merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang

tangible atau dapat diukur/dihitung. Kasus-kasus penyalahgunaan aset bisa dikategorikan kesalahan administratif, perdata, atau pidana. Penyelesaian untuk kasus-kasus seperti penggelapan dan pencurian tidak hanya berhenti sampai aset yang disalahgunakan tersebut dikembalikan, masih ada proses tuntutan secara pidana atas tindakan penyalahgunaannya tersebut.

Menurut Hasan (2000), faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset adalah kurangnya transparansi, mengabaikan pengendalian intern, kolusi diantara para pegawai dan pihak ketiga, kurangnya pemeriksaan dan pengawasan, lemahnya/tidak adanya kebijakan etika korporasi dan komitmen. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan aset tersebut menurut Akbar (2006), diperlukan kontrol internal yang kuat, moral karyawan yang teruji dan pihak pengawas yang profesional, independen serta berintegritas untuk melakukan pengawasan.

Penelitian sebelumnya

Hasil penelitian Khairudin (2005), meneliti pengaruh peran inspektorat terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan publik dan badan usaha milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap kecenderungan kecurangan dan salah satu dimensi kecurangan adalah penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian Yudi (2012), meneliti pengaruh peran inspektorat dan pelaksanaan SPI terhadap penyalahgunaan

aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negative terhadap penyalahgunaan aset.

Arvindo Moningka (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perusahaan Ritel di Manado memperoleh hasil variabel pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang salah satu jenis kecurangan akuntansi adalah penyalahgunaan aset.

Murniati (2008) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pelaksanaan pengendalian intern dan peran auditor terhadap pencegahan kecurangan memperoleh hubungan signifikan positif antara sistem pengendalian intern dengan pencegahan kecurangan dan peran auditor dengan pencegahan kecurangan. Salah satu jenis kecurangan adalah penyalahgunaan aset.

1. Hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset

Didalam Peraturan menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik dan berkualitas maka kehandalan laporan keuangan dapat terlindungi sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Sawyer (2006), Lingkungan dapat mengundang terjadinya penggelapan atau kecurangan. Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol, atau kontrol internnya lemah, atau terdapat kontrol intern namun tidak berfungsi.

Wilopo (2006) menyatakan jika suatu pengendalian internal perusahaan lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional/perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan.

Menurut Fitriana (2010), jika suatu struktur pengendalian intern di instansi pemerintah daerah lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional entitas serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan Kepala Daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut Arie (2008), Nani (2010) dan Fitriana (2010), sistem pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian intern lemah, maka akan memudahkan terjadinya kecurangan terhadap laporan

keuangan yang disajikan. Jika suatu pengendalian intern lemah dalam suatu perusahaan, maka akan memudahkan karyawan untuk mengambil harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga nantinya akan membuat harta kekayaan perusahaan hilang yang bisa memicu untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan publik dan badan usaha milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap kecenderungan kecurangan.

2. Hubungan antara peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset

Inspektorat daerah merupakan unsur pemeriksa dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Yang kegiatan utama inspektorat meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi, yang berpedoman pada Standar Audit Jadi dengan adanya inspektorat yang berintegritas dan berkualitas maka penyalahgunaan aset dapat ditanggulangi sehingga aset negara dapat terlindungi demi menjaga kemakmuran masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 pasal 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak

Dalam PP No. 79 tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan, inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya meliputi pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan PP no. 41 tahun (2007), Inspektorat daerah merupakan unsur pemeriksa dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, jadi dengan adanya peran efektif yang dijalankan oleh inspektorat maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian Khairudin (2005), yang membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Daam penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal pada tahun 2006 dengan objek penelitian di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku. Penelitian ini berjudul Pengaruh Peran Inspektorat, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap kinerja SKPD(Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku) menunjukkan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik peran inspektorat maka tindakan penyalahgunaan aset dapat diminimalisir.

Kerangka pemikiran

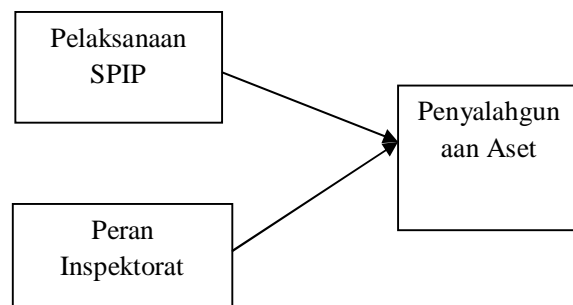
Didalam suatu organisasi adakalanya terjadi berbagai macam penyimpangan apalagi didalam organisasi pemerintahan salah-satunya penyalahgunaan aset, dituntut peran besar aparat pemeriksa dan pengawas

dalam menyelesaikan masalah ini yaitu pihak (Inspektorat) yang indenpenden.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor penting yang tidak bisa dilepaskan di dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih, dengan adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif maka aset di dalam instansi pemerintahan akan aman, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern lemah maka aset-aset didaerah mudah untuk diselewengkan.

Disamping itu dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat maka akan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Dengan demikian apabila peran inspektorat dijalankan dengan baik dan berintegritas maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset, sebagaimana sesuai dengan salah satu tugas pokoknya mengusut atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan

Gambar Kerangka Konseptual



Gambar 1. Diagram Hubungan antar Variabel Penelitian

Hipotesis

Dari uraian latar belakang,kajian teori dan kerangka konseptual diatas,maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1= Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh

signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.
H2= Peran Inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

3. Metode penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh suatu variable terhadap variable lainnya. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset dan peran Inspektorat terhadap Penyalahgunaan aset.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh SKPD di Kota Padang. Yang berjumlah sebanyak 45 SKPD Kota Padang. Alasan penulis memilih seluruh SKPD kota Padang karena seluruh unit kerja pada SKPD tersebut melakukan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional masing-masing unit kerja.

Pemilihan sampel penelitian ini akan dilakukan dengan metode *Total Sampling*. Hal ini disebabkan karena SKPD yang ada di Kota Padang hanya berjumlah 45 SKPD.

Teknik pengambilan sample adalah *total sampling*. Total sampling yaitu mengambil seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang terdiri dari Kasubbid PPTK (penjabat pelaksana teknis kegiatan) dan Bendahara, karena tugas pejabat ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi serta berperan dalam

menyusun pembukuan keuangan didalam SKPD.

Metode Analisis Data

Uji validitas dan realibilitas akan dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan dan audit dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid (sah) atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur (Valid).

Dengan menggunakan SPSS Versi 17.0 dapat dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilainya negatif atau kecil dari r tabel, maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilainya besar dari r tabel maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid maka item yang memiliki nilai r hitung yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semuanya dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu (Imam,2007:41). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Menurut Nunnaly (1967), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

Uji Coba Instrumen

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah lulus mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan, Auditing, dan Seminar Akuntansi Sektor Publik, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, karena dianggap mengerti dengan permasalahan yang ada pada penelitian.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Dimana r_{tabel} untuk $n = 30$ adalah 0.306. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi dari sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $>0,05$ maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan regresi berganda

maka dilakukan uji Multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas yang berarti. Menurut Ghozali (2006:92) pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya hubungan linear antar variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan *Variable Inflation Factor* (VIF). Bila nilai $VIF > 10$ dan $tolerance < 0.1$ berarti ada Multikolinearitas, sebaliknya jika nilai $VIF < 10$ dan maka tidak ada terjadi Multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heterokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heterokedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual.

Masalah heterokedastisitas terjadi ketika penyebaran tersebut tidak seimbang atau ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Untuk menguji terjadi tidaknya heterokedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila $sig. > 0.05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Regresi Berganda

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

(Ghozali, 2006:85)

Dimana :	Y	= Penyalahgunaan aset
	B_{12}	= Koefisien regresi dari variabel independen
	X	= Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah
	X_2	= peran inspektorat
	a	= constant
	e	= epsilon

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak, nilai sig $0,000^a < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistic yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji t (t-test)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $\beta = 0,05$ kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1, H_2, H_3, H_4 didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq \beta = 0,05$ maka tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis H_1 dengan demikian dapat dikatakan pemeriksaan inspektorat berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset
2. Jika tingkat signifikansi $\geq \beta = 0,05$ maka hipotesis H_2 ditolak dengan demikian dapat dikatakan pemeriksaan inspektorat tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset.

4. Hasil analisis data dan pembahasan

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang pengaruh pelaksanaan sistem intern pemerintah dan Peran inspektorat terhadap Penyalahgunaan aset pemerintah daerah kota Padang. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

a. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (X_2)

Variabel Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terdiri dari indikator 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian resiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, 5) Pemantauan. Sub variabel tersebut tersebar dalam 13 item pertanyaan pada kuesioner.

Indikator Pimpinan instansi menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan saran komunikasi memperoleh

tingkat capaian responden tertinggi yaitu sebesar 90,54%. Untuk indikator Pemerintah daerah memiliki integritas dan nilai-nilai etis dengan tingkat capaian responden terendah 82,98%. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar 87,55% dari 74 responden pada SKPD pemerintah di Kota Padang yang diteliti.

b. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran Inspektorat (X_1)

Variabel Peran inspektorat terdiri dari indikator 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, ketepatan waktu dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara, 2) Melakukan pemeriksaan terhadap prosedur akuntansi, 3) Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara laporan keuangan SKPD dengan SAP, 4) Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi pengeluaran dan penerimaan daerah, 5) Melakukan pemeriksaan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran daerah, 6) Melakukan pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi, 7) Memeriksa pertanggungjawaban transaksi pengeluaran daerah yang belum/tidak tersedia anggarannya.

indikator Inspektorat memeriksa apakah Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah mendapat tingkat capaian responden tertinggi 88,65%, yang menunjukkan bahwa inspektorat telah melakukan tugasnya dengan baik. Indikator Inspektorat melakukan pemeriksaan apakah penyedia dan pengguna anggaran untuk suatu program telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis mendapat tingkat capaian responden terendah 82,97%. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari peran inspektorat daerah adalah sebesar 85,60%. Dari 74 responden pada SKPD pemerintah Kota Padang yang diteliti.

c. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Penyalahgunaan Aset (Y)

Variabel Penyalahgunaan Aset terdiri dari indikator yaitu 1) Melakukan pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat dalam sistem akuntansi, 2) Melakukan pencurian aset secara sengaja, 3) Pencurian persediaan dan aset, 4) Kecurangan pengeluaran kas. Jumlah item pernyataannya adalah 11 item.

indikator Aset digunakan hanya untuk kepentingan instansi dengan tingkat capaian responden tertinggi 87,57%. Indikator Selalu adanya perlindungan terhadap aset-aset yang ada di dalam instansi bersangkutan dengan tingkat capaian responden terendah 81,9% menunjukkan bahwa perlindungan aset yang ada di dalam instansi belum sepenuhnya menjadi ukuran untuk menjadi sasaran tujuan bagi masing-masing SKPD. Sedangkan tingkat capaian rata-rata sebesar 84,76%, Dari 74 responden pada SKPD pemerintah di Kota Padang yang diteliti.

A. Uji Validitas dan Reliabilitas pada Data Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 74$, adalah **0,229**. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Nilai terkecil dan terbesar dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Penyalahgunaan aset diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,231 dan nilai terbesar 0,680. Instrumen Pelaksanaan SPIP nilai terkecil

0,259 dan nilai terbesar 0,674. Instrumen peran inspektorat nilai terkecil 0,244 dan nilai terbesar 0,652.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6.

B. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas :

1. Uji Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, dengan melihat nilai $\alpha > 0,05$. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa residual terdistribusi secara normal. Dari tabel uji normalitas terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,504. Berarti data dapat dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi terjadi tidaknya multikolinearitas dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*

(VIF). Multikolinearitas tidak terjadi karena nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$.

Nilai *Tolerance* dari *Colinearity Statistic* $> 0,1$ yaitu 0,736 Pelaksanaan SPIP (X_1) 0,736 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (X_2), dan nilai VIF untuk variabel independen juga menunjukkan < 10 yaitu 1,740 Pelaksanaan SPIP (X_1), dan 1.740 Peran inspektorat (X_2). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas dilakukan dengan metode *Spearmen Correlations*. Jika probabilitas signifikansi diatas 5%, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda.

1. Uji Model

a. Koefisien Regresi Berganda

model estimasi sebagai berikut:
 $Y = 85,164 - 0,324 X_1 - 0,427 X_2 + e$

Dimana :

Y = Penyalahgunaan aset
 X_1 = Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
 X_2 = Peran inspektorat

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 85,164 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pelaksanaan SPIP

dan peran inspektorat tidak ada maka nilai penyalahgunaan aset adalah sebesar 85,164.

2. Koefisien Pelaksanaan SPIP sebesar -0,324 dimana setiap peningkatan pelaksanaan SPIP akan mengakibatkan penurunan penyalahgunaan aset sebesar 0,324.
3. Koefisien Peran inspektorat sebesar -0,427 dimana setiap peningkatan peran inspektorat satu satuan akan mengakibatkan penurunan penyalahgunaan aset 0,427.

b. *Adjusted R Square*

Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan sebesar 0,397. Hal ini mengindikasikan bahwa 39,7% penyalahgunaan aset dapat dijelaskan oleh pelaksanaan SPIP dan peran inspektorat sedangkan sisanya 60,3% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

c. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan tabel 19 di bawah, hasil pemrosesan data menunjukkan hasil sebesar 25,069 yang signifikan pada 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Uji Hipotesis

Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh, maka uji hipotesis dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang diajukan, bahwa pelaksanaan SPIP (X_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset (Y)

Nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 adalah -2,206, signifikan pada level 0,000, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,206 < 1,666$ (sig.0,000 <0,05). Nilai koefisien regresi variabel X_1 adalah -0,324 (bernilai negatif). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pelaksanaan SPIP maka terjadi penurunan tindakan penyalahgunaan aset, maka Hipotesis pertama diterima, yang menunjukkan peran inspektorat berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset.

2. Hipotesis kedua yang diajukan, Pelaksanaan peran inspektorat (X_2) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyalahgunaan aset (Y)

Nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 adalah -2,307, signifikan pada level 0,000, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,307 < 1,666$ (sig.0,000 <0,05). Nilai koefisien regresi variabel X_2 adalah -0,427 (bernilai negatif). Hal ini menunjukkan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset, sehingga Hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat peran inspektorat maka terjadi penurunan tindakan penyalahgunaan aset, jadi peran inspektorat berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset.

Pembahasan

1. Pengaruh Pelaksanaan SPIP terhadap Penyalahgunaan Aset

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa

hipotesis pertama (H1) yaitu pelaksanaan SPIP berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan SPIP maka tindakan penyalahgunaan aset akan semakin berkurang.

Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh tunggal (2010) yang menyatakan bahwa entitas yang melaksanakan pengendalian intern tentu akan membantu mereka dengan mudah mengecek kecurangan yang terjadi, dan pada akhirnya akan mudah mendeteksi kecurangan secara dini.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan publik dan badan usaha milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap kecenderungan kecurangan.

2. Pengaruh Peran Inspektorat terhadap Penyalahgunaan Aset

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) yaitu peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset. Hal ini berarti semakin baik peran inspektorat maka akan terjadi penurunan tindakan penyalahgunaan aset.

Berkaitan dengan hubungan antara penyalahgunaan aset dengan peran inspektorat, disebutkan bahwa Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan aset tersebut menurut sawyer's (2006), diperlukan kontrol internal yang kuat, moral karyawan yang teruji dan pihak pengawas yang profesional, independen serta

berintegritas untuk melakukan pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian Khairudin (2005), meneliti pengaruh peran inspektorat terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan penyalahgunaan aset.

Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh pelaksanaan SPIP dan Peran inspektorat pada pemerintah daerah kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SPIP berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.
2. Peran Inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa

keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kota saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Karena rentang waktu antara fenomena yang terjadi dengan pelaksanaan penelitian menyebabkan adanya perbedaan antara hasil penelitian dan fenomena yang terjadi. ini dapat dilihat dari tingginya TCR, kemungkinan populasi penelitian yaitu SKPD Kota Padang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Internnya dan Inspektorat daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Kuisisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuisisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja. Sehingga ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk penelitian selanjutnya kuisisioner perlu dimodifikasi dan lebih dispesifikasikan agar hasilnya tidak bias.
2. Memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti dengan memperluas daerah penelitian agar penelitian tersebut lebih menunjukkan hasil yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2008. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arens A, Alvin, Elder j. Ronald & Beasley Mark 2008. *Auditing dan jasa*

- Assurance, Edisi 12*, Ahli Bahasa Tim Dejacarta. Jakarta: PT Indeks.
- Djahari, 2006. *Invetarisir Terhadap Aset Daerah*. Melalui (www.google.com)
- Hasan Saefuddin. 2000. *faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan aset*. bahan Konvensi Nasional Akuntan IV.
- Johansyah, Ludy. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Palangka. Kalimantan timur
- Mardi. 2009. *Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal*. Sumbarprov.go.id
- Mulyadi. 1993. *Sistem Informasi akuntansi*, Yogyakarta: LPKN.
- Peraturan Pemerintah No.79 Tahun (2005). Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.presidentri.go.id) [07/12/2011].
- _____. No.60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui (www.presidentri.go.id) [07/12/2011].
- _____. No.41 tahun 2007. Tentang perangkat daerah. Melalui (www.presidentri.go.id) [07/12/2011].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007. Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.presidentri.go.id) [05/06/2011]
- _____. No. 64 tahun (2007) Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat kabupaten/kota. Melalui (www.presidentri.go.id) [03/06/2011]
- _____. No.13 tahun 2008. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Melalui

- (www.presidentri.go.id)
[03/06/2011]
- Priyatno,duwi.2011. *SPSS Analisis Statistik Data*.Yogyakarta: MediaKom
- Satria.budi.2010, Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik. *Skripsi*. UNP. Padang.
- Singleton,Tommie,et,al. 2006. *Fraud Auditing And Forensic Accounting*. Canada: John Wley and Sons,Inc
- Sawyer,B lawrence,moretimer A & James H.Scheiner.2006.*Sawyer's Internal Audit*. Buku 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta.2007. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.Amerika Serikat.
- Undang-undang Nomor.15 tahun 2004. Tentang objek pemeriksaan Inspektorat daerah. Melalui (www.presidentri.go.id) [03/06/2011].

LAMPIRAN

Hasil Uji Analisis

A. statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PA	74	38.00	55.00	46.6216	3.88782
PI	74	40.00	55.00	47.0811	3.15689
SPIP	74	51.00	65.00	56.9054	3.98342
Valid N (listwise)	74				

B. Teknik Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.97642374
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.82
Asymp. Sig. (2-tailed)		.50

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b) Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pelaksanaan SPIP	.736	1.740
	Peran Inspektorat	.736	1.740

a. Dependent Variable: Penyalahgunaan Aset

c) Uji Heteroskedastisitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49.995	7.141		7.001	.000
	Pelaksanaan SPIP	.019	.191	.020	.101	.920
	Peran Inspektorat	-.094	.242	-.076	-.386	.701

a. Dependent Variable: ABSUT

2. Uji Model

a) Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	456.691	2	228.346	25.069	.000 ^a
	Residual	646.714	71	9.109		
	Total	1103.405	73			

a. Predictors: (Constant), Peran Inspektorat, Pelaksanaan SPIP

b. Dependent Variable: Penyalahgunaan Aset

b) Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.643 ^a	.414	.397	3.01805

a. Predictors: (Constant), Peran Inspektorat, Pelaksanaan SPIP

c) Analisis Regresi

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85.164	5.463		15.589	.000
	Pelaksanaan SPIP	-.324	.147	-.332	-2.206	.031
	Peran Inspektorat	-.427	.185	-.347	-2.307	.024

a. Dependent Variable: Penyalahgunaan Aset

a. Dependent Variable: Penyalahgunaan asset